

Analisis Kebijakan Pendidikan Tinggi Pada Pembelajaran Jarak Jauh Di Indonesia

Rahula Hananuraga, Eliza Ariesta,
Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda

ABSTRACT

This research is qualitative through literature study using policy analysis. This study examines in detail the analysis of higher education policy with the aim of describing the analysis of higher education policy on distance learning in Indonesia. Based on the results of the study, it can be concluded that in some distance learning implementation processes, there are often limitations or obstacles encountered such as differences with the supposed learning process, many think that the obligation of educators in implementing online learning is much lighter than face-to-face learning. Distance learning has good size limitations, community connections and technical errors along with serverdowns and other errors that hinder the success of acquiring knowledge. Therefore, the government hopes that the creativity of teachers in providing learning can appeal to the interests of students so that it affects academic achievement. In addition, assistance is needed from the government to offer facilities that support the implementation of distance learning. In this way, the implementation can run smoothly and effectively.

Key words : *policy, higher education, covid-19 pandemic, distance learning*

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan menggunakan analisis kebijakan. Studi ini mengkaji secara rinci analisis kebijakan pendidikan tinggi dengan tujuan untuk mendeskripsikan analisis kebijakan pendidikan tinggi pada pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pada beberapa proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, seringkali terdapat batasan atau kendala yang dihadapi seperti perbedaan dengan proses pembelajaran yang seharusnya, banyak yang memikirkan kewajiban pendidik dalam menerapkan pembelajaran online ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran jarak jauh memiliki batasan ukuran yang baik, koneksi komunitas dan kesalahan teknis bersama dengan serverdown dan kesalahan lain yang menghambat keberhasilan memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, pihak pemerintah berharap kreativitas guru dalam membekali pembelajaran agar dapat menghimbau kegemaran mahasiswa sehingga berpengaruh terhadap prestasi akademik. Selain itu bantuan sangat diperlukan dari pemerintah untuk menawarkan fasilitas yang menyokong pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Dengan begitu, pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan efektif.

Kata kunci : kebijakan, pendidikan tinggi, pandemi covid-19, pembelajaran jarak jauh.

Riwayat Artikel : Diterima: 3 oktober 2021

Disetujui: 2 November 2021

Alamat Korespondensi:

Rahula Hananuraga,

Magister Pendidikan Keagamaan Buddha

Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda Jakarta

Jalan Pulo Gebang Permai No.107 Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur 19350

E-mail: redaksidhammavicaya@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia telah membahas modernisasi pendidikan tinggi sejak pertengahan 1990-an. Pemerintah telah mencoba berbagai peraturan baru atau pedoman yang disesuaikan untuk pendidikan tinggi yang terbaik, responsif, dan bertanggung jawab. Mereka mungkin menjadi pilar reformasi berdasarkan otonomi kelembagaan ekstra dan mekanisme pembiayaan kompetitif untuk alokasi bantuan. Contoh baru adalah untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada lembaga akademis yang terorganisir secara maksimal untuk menjalankan urusan mereka sendiri dan sebagai imbalan atas pelatihan yang lebih tinggi di Indonesia dibuatlah arah politik yang bertanggung jawab untuk menyerahkan hasil yang lebih baik. Seiring berkembangnya lembaga-lembaga terkemuka ini, otonomi dapat diperluas dan diberikan kepada lembaga-lembaga yang berbeda dalam pelatihan yang lebih baik. Banyak yang telah menunjukkan bahwa negara dibuat untuk melakukan inisiatif percontohan ini (Public Disclosure Authorized, 2014). Sebagian besar generasi baru sangat menentukan kemajuan suatu negara pada zaman ini dan zaman yang akan datang. Sistem pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan generasi muda yang berkualitas pula. Tanpa

bantuan kemajuan di sektor pendidikan, percepatan kemajuan suatu negara tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Maka dari itu, diperlukan peran dari generasi muda dalam berkontribusi untuk kemajuan suatu negara dengan memanfaatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang (Muhardi, 2005).

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang adil dan makmur, aman dan damai, serta maju dan mendunia membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Berbagai upaya modernisasi pendidikan terus dilakukan sejak dahulu. Namun, masalah pendidikan di seluruh daerah di negeri ini masih terikat oleh masalah sederhana, terutama masalah akses terhadap mutu pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, diperlukan tanggung jawab yang besar untuk setiap elemen yang terlibat. Popularitas tentang COVID-19 telah menyoroti beberapa hal sejumlah isu kritis yang perlu segera diatasi karena demi keberlanjutan dan pendidikan terbaik, serta kesejahteraan peserta didik dan pendidik itu sendiri. Sesulit apapun itu, kita harus tetap berjuan dan mensyukuri proses modernisasi pendidikan sebagai kunci pertimbangan negara kita tercinta (Sari dkk., t.t.)

Setelah menempuh pendidikan menengah, peserta didik dapat melanjutkan proses menuntut ilmu di pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mengumpulkan peserta didik agar menjadi kontributor bagi masyarakat yang memiliki bakat akademik dan profesional dalam penerapan, pengembangan, dan kreasi dalam perkembangan teknologi yang pesat ini. Peserta didik dapat memilih sendiri perguruan tinggi favoritnya untuk menempuh pendidikan di bidang yang diminatinya. Untuk itu, secara legal-formal perguruan tinggi kini tidak hanya bertindak sebagai pusat pengajaran karena teknik belajar mengajar dilakukan di dalam kelas tanpa didukung melalui hasil-hasil non penelitian yang diajukan. Pendidikan tinggi adalah investasi yang luar biasa di Indonesia, bahkan ketika menghadiri perguruan tinggi berkualitas rendah. Analisis empiris kondisi pasar kerja tidak membantu gagasan bahwa mayoritas alumni pendidikan tinggi menganggur ataupun hanya sedikit gajinya. Fakta ini merupakan tujuan utama yang seharusnya perlu dibentuk untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang lebih baik di Indonesia (Public Disclosure Authorized, 2014).

Efek yang bagus dari pendidikan tinggi yang lebih baik sejauh ini tidak menjamin bahwa itu akan bertahan ke depannya. Tuntutan akan keterampilan di pasar akan membebani universitas dan lulusan untuk memberikan kompetensi yang lebih banyak dan lebih baik kepada pemberi kerja. Pemerintah harus merumuskan dan memberlakukan aturan bahwa rentang dan korelasi sebelum pasar kerja berubah menjadi jenuh dengan orang-orang di tingkat keterampilan saat ini dan hasil yang lebih rendah. Pendidikan tinggi adalah investasi yang luar biasa, baik bagi setiap orang dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Ini berlaku bahkan di tingkat kualitas dan tingkat pendidikan tinggi saat ini. Upaya yang besar dilakukan di seluruh sistem untuk meningkatkan hasil pembelajaran untuk memastikan bahwa lulusan memiliki lebih banyak pengetahuan dan bakat. Walaupun sistem pendidikan tinggi di Indonesia belum mampu untuk memberikan peluang yang relevan dan berkualitas bagi lulusan SMA secara optimal (Public Disclosure Authorized, 2014).

Mengingat awal tahun 2020 terjadi perubahan drastis dalam dunia pendidikan di beberapa negara. Sehingga mengakibatkan semua jenjang pendidikan termasuk perguruan tinggi harus menetapkan pembelajaran yang awalnya diatur dengan belajar langsung/tatap muka beralih ke pembelajaran. Banyak kebijakan yang bersifat edukatif yang dicoba untuk diterapkan demi mencegah penularan virus corona 2019 (Covid-19) ataupun untuk memutus penyebaran virus berbahaya tersebut. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020, semua pendidik dianjurkan menerapkan pembelajaran daring (Jeffry Handika dkk, 2020). Dengan adanya surat edaran tersebut, menjadikan rujukan bagi sekolah, universitas, dan sistem pendidikan lainnya untuk mengeluarkan surat edaran serupa agar pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh. Implementasi kebijakan secara empiris sangat tergantung pada beberapa hal. Pembelajaran online tidak dapat dilakukan dengan baik jika pihak universitas maupun orang tua tidak memiliki modal yang cukup untuk mengakses penyokong pembelajaran daring tersebut. Pembelajaran daring ini tidak akan terjadi jika peserta didik maupun pendidik tidak memiliki komputer, ponsel, dan jaringan internet yang memadai. Maka dari itu, pemerintah pusat penting untuk memastikan keberlangsungan pembelajaran online melalui penyediaan jaringan internet yang lancar dan subsidi kuota bagi pendidik dan peserta didik, juga meningkatkan akses di berbagai daerah terpencil yang biasanya terkendala jaringan dan perangkat digital. Seharusnya ada dana khusus untuk membantu kelancaran pelaksanaan kebijakan ini. Untungnya, pemerintah baru-baru ini mengaktifkan anggaran dana untuk membantu pelaksanaan pembelajaran online. Pada dasarnya, pendidikan menjadi sangat vital

bagi sebuah Negara dan harus selalu diupayakan agar berjalan dengan baik dan lancar dalam keadaan apapun (Sari dkk., t.t.)

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan menggunakan analisis kebijakan. Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan menelaah secara visual berbagai macam referensi yang secara cermat dikaitkan dengan masalah yang dibahas, baik itu buku, makalah, jurnal, esai, skripsi maupun tulisan-tulisan lain yang bersifat penunjang sehingga dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Studi ini mengkaji secara rinci analisis kebijakan pendidikan tinggi dengan tujuan untuk mendeskripsikan analisis kebijakan pendidikan tinggi pada pembelajaran jarak jauh di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Analisis Kebijakan dan Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi

Istilah kebijakan bisa diartikan sebagai politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepahaman, pedoman, dan rencana strategis lainnya. Kebijakan adalah aturan yang dibuat secara tertulis yang merupakan hasil keputusan resmi suatu lembaga/kelompok. Beberapa contoh kebijakan yaitu undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden, dan lainnya. Sasaran kebijakan harus melaksanakan kebijakan tersebut karena sifatnya mengikat. Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah bersifat universal, artinya berlaku seluruh segala warga (Abidin, 2006).

Semenjak manusia sanggup melahirkan, analisis kebijakan ditatap selaku prosedur berpikir manusia yang telah lama ada. Sehingga untuk mempertahankan pengetahuan dalam konteks aksi yang diambil selaku pilihan adalah sebuah keharusan. Selaku respon dari timbulnya bermacam kasus pembelajaran yang jadi atensi publik, pula selaku pedoman yang berperan serta dalam hal pemecahan dan inovasi guna menggapai visi serta misi pembelajaran oleh pemerintah ataupun pihak yang lain yang mengurus pembelajaran, diperlukan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ataupun penyelenggara pendidikan yang disebut dengan kebijakan pembelajaran. Sebagian expert yang lain membagikan uraian analisis kebijakan selaku kajian dari ilmu sosial terapan yang bertumpu pada argumentasi yang rasional, kenyataan, informasi buat menarangkan, memperhitungkan, serta menciptakan pemikiran terbaik buat membongkar permasalahan (Arwildayanto, dkk, 2018).

Proses penyusunan sebuah analisis kebijakan pembelajaran yang sedemikian rupa sebagai ilmu sosial terapan yang sistematis bertujuan untuk mengidentifikasi substansi kebijakan pembelajaran. Dengan adanya kebijakan tersebut dapat diketahui dengan jelas masalah yang harus ditangani dan masalah yang berpeluang muncul di permukaan. Analisis kebijakan menjadi sesuatu yang sangat signifikan dalam masa demokrasi yang mencakup pencapaian revolusi industri 4.0. Dimana pemerintah atau pihak yang berwenang tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan warga negara. Setiap tindakan yang dilakukan harus dipikirkan dengan baik apa dampaknya bagi warga negara dan bisa bermanfaat banyak bagi semua orang dalam bidang pendidikan (Arwildayanto, dkk, 2018).

Tilaar dan Nugroho (2008) menuturkan bahwa kebijakan pendidikan tidak lepas dari hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi manusia yang mandiri. Hal tersebut menandakan bahwa pendidikan merupakan proses pemberdayaan agar bisa menghasilkan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mandiri dan bertanggung jawab atas keberadaannya sendiri menurut Ki Hajar Dewantara. Diperlukan iklim kebebasan yang dapat menjamin kebebasan berdialog dengan dirinya, sahabatnya, dengan alam dan dengan pendidiknya untuk menggali kemampuan yang diberikan oleh pencipta, guna menghasilkan kreasi baru (Bakry, 2010).

Dunia pendidikan tidak lepas dari kekuatan yang memberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri, menggali potensi dan bersosialisasi dengan manusia lain sehingga dapat menjadi manusia dewasa. Hal ini dikarenakan istilah kemerdekaan dan kebebasan terkait dengan konsep kekuasaan dan keduanya tidak terisolasi. Hal pertama yang harus dilakukan jika ingin masyarakat demokratis adalah mendemokratisasi pendidikan. Artinya pendidikan bukanlah sesuatu yang membekali siswa dengan pengetahuan, tetapi pengetahuan yang dimiliki melalui pengalaman peserta didik dalam suasana yang bebas dan mandiri (Tilaar, 2003 dan Tilaar, 2005)

Pendidikan tinggi sebagai komunitas ilmiah diperlukan untuk memainkan fungsi yang baik secara aktif dalam memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat dengan menggunakan pengetahuan yang siap pakai. Oleh karena itu, pengetahuan yang diperoleh melalui studi dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi kegiatan dalam kehidupan masyarakat, bisnis dan industri. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan alumni yang tangguh, memiliki keterampilan yang unggul, kecerdasan, dan kreativitas agar mereka mampu bersaing dengan berbagai negara dalam menghadapi globalisasi. Keberadaan perguruan tinggi memiliki posisi dan ciri yang vital dalam kemajuan suatu negara dan tertuang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Yuliawati, 2012).

Kebebasan yang lebih besar bagi universitas akan meningkatkan kualitas pendidikan yang luar biasa yang berlaku untuk peserta didik dan efisiensi penggunaan sumber daya universitas. Terlepas dari kekhawatiran tentang mekanisme pendanaan yang tidak efisien, pendekatan penganggaran yang rumit dan tidak jelas, struktur jaminan berkualitas tinggi yang tidak memadai, persyaratan pegawai negeri untuk fakultas dan lainnya, otonomi universitas harus tetap menjadi bagian penting dari keseluruhan kebijakan. Fakta bahwa lulusan perguruan tinggi saat ini dapat digaji tinggi tidak mengurangi kebutuhan untuk meningkatkan mutu dan relevansi mutu lulusan. Lebih banyak bakat dan pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi, stok bakat dan pengetahuan yang dimiliki lulusan pendidikan tinggi akan terus memastikan gaji yang tinggi dan pekerjaan yang baik (Public Disclosure Authorized, 2014).

Public Disclosure Authorized (2014) mengemukakan beberapa arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia yaitu 1) Kebijakan pemerintah harus memfasilitasi pertumbuhan sektor pendidikan tinggi pada saat yang sama meningkatkan kualitas dan relevansi di semua rentang. Peraturan seharusnya tidak hanya memperluas hak masuk, tetapi juga menciptakan situasi yang mempromosikan kualitas penyedia layanan pendidikan tinggi, alternatif gelar dan keterjangkauan. 2) Pihak berwenang harus menerapkan cakupan bantuan keuangan lengkap yang mendukung tujuan (yaitu meningkatkan biaya perangkat lunak dan berdasarkan sejarah yang buruk). Pemerintah harus memberikan bantuan kepada semua peserta didik untuk pendidikan yang lebih baik. Kekurangan secara finansial dan menawarkan dasar untuk tumbuh mendapatkan hak masuk untuk anak-anak kuliah dari dua pendapatan terbawah. 3) "kecocokan dengan tujuan" — kapasitas organisasi untuk menanggapi keinginan peserta didik — harus melengkapi atau mengganti kekakuan instruksional ini adalah definisi utama kualitas di kampus. Efisiensi dan relevansinya harus diterapkan dalam difusi disiplin ilmu dan topik mengenai tingkat kapabilitas dan aspirasi lulusan fakultas, dan bukan hanya sekedar berbakat secara akademis. Untuk lulusan dalam pasar tenaga kerja mendapatkan prioritas untuk investasi pemerintah dan kebijakan lain yang menciptakannya seperti komunitas akademi, paket diploma, dan studi yang terkait dengan pencapaian jangka pendek. 4) Universitas dapat dengan mudah menanggapi kebutuhan sarjana jika mereka memiliki kemampuan dan insentif untuk membuat pilihan penting bagi kelompoknya. Otonomi dan penggunaan aset yang akuntabel untuk keputusan ini. otonomi sekolah yang lebih baik adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan reaksi yang diinginkan di dalam mesin pelatihan yang lebih tinggi. 5) Meningkatkan kualitas tinggi dan menyebarkan catatan dan data tentang mesin pelatihan yang lebih baik (khususnya untuk calon mahasiswa) untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Analisis Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh

Menimba ilmu adalah hal krusial yang maksimal bagi setiap negara, khususnya bagi negara yang sedang berkembang yang secara aktif membangun. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan bantuan manusia yang dipersiapkan melalui studi, sehingga akan diperoleh hakikat kemanusiaan itu, khususnya sebagai pemimpin di dunia. Pengembangan penguasaan tidak lepas dari tugas pendidik yang mengajarkan ilmunya dengan materi yang ada, serta dengan memperhatikan teknik yang mungkin tanpa masalah tersebar luas dengan bantuan mahasiswa agar tujuan yang dicapai sesuai dengan apa yang diramalkan (Idrus, 2019).

Pembelajaran jarak jauh bukan hal yang asing dalam dunia pendidikan karena sejak tahun 1891 Universitas Wisconsin di Amerika Serikat telah menjadi universitas pelopor dalam dunia pembelajaran jarak jauh. Seiring berjalannya waktu, hampir 1/2 dari sekitar 3.900 sekolah tinggi di Amerika menawarkan beberapa jenis pembelajaran jarak jauh. Kebanyakan orang-orang yang bekerja setiap hari dengan waktu sibuk, tinggal dan jauh dari sekolah pasti akan mengalami berapa banyak kemungkinan yang hilang jika mereka harus mengambil pelajaran atau kuliah di lembaga pendidikan karena ternyata menghabiskan beberapa jam setiap hari duduk di kelas, melihat jadwal, praktikum dan semua kegiatan yang berbeda beserta jam operasionalnya. Hal inilah yang

melatarbelakangi diadakannya pembelajaran jarak jauh. Berbagai upaya dilakukan untuk membantu terwujudnya pembelajaran jarak jauh dengan meningkatkan pelayanan yang lebih baik dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi (Sari dkk., t.t.)

Pada awal pelaksanaannya, pembelajaran jarak jauh dianggap sebagai alternatif bentuk pelatihan yang tidak kalah bagusnya dengan pelatihan tradisional. Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang cepat, saat ini pembelajaran jarak jauh diadakan secara online melalui jaringan internet yang disambut baik oleh masyarakat dan beberapa orang bahkan menganggapnya lebih bergengsi daripada pendidikan tradisional yang kurang memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini (Munir, 2009).

Komunikasi antara peserta didik dan pendidik berlangsung secara virtual pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini dibutuhkan komunikasi yang baik antara peserta didik, orang tua dan pihak kampus. Media yang digunakan untuk membantu berkomunikasi di dunia maya adalah beberapa media sosial seperti WhatsApp dan lain-lain serta media conference seperti zoom, google meet dan lain-lainnya. Pada pelaksanaannya akan ada banyak konsultasi, diskusi dan berbagi antara orang tua dan pihak kampus tentang perkembangan pembelajaran anak selama pembelajaran jarak jauh dan melanjutkan pendidikan peserta didik setelah lulus. Hal ini dilakukan jika orang tua peserta didik memang memerlukan dan kalau ada waktu karena pada realitasnya jarang ada orang tua yang melakukannya (Ni'mah, 2016).

Ali Taufik berpendapat bahwa ketika mempersiapkan bagian integral dari proses implementasi pendidikan jarak jauh terapan, universitas dengan pemerintah setempat harus bekerja sama mengenai pelaksanaan inventarisasi kebutuhan proses peningkatan sumber daya manusia di setiap wilayah lokasi melalui penerapan komponen yang meliputi daftar sumber daya manusia yang terdidik, terampil, dan terlatih. Penyajian kerangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran jarak jauh telah dioptimalkan untuk membangun kreativitas dan pengetahuan dalam konteks daerah masing-masing, dalam konteks pengembangan pengetahuan dan penerapan teknologi untuk mempercepat proses pembangunan (Taufik, 2019).



Gambar 1. Skematik Proses Pendidikan Jarak Jauh Yang Dilaksanakan Dalam Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pada Skematik di atas, masing-masing stakeholders bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung sistem pembangunan yang terorganisir sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. Kolaborasi

aktif melibatkan pengembangan sumber daya manusia yang aman yang dibatasi oleh lingkungan dan medan, dan mengidentifikasi pembelajaran jarak jauh sebagai alternatif untuk mengembangkan sumber daya manusia yang terlatih, terampil, dan terdidik. Hal ini untuk mengembangkan kawasan secara efektif dan efisien sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan lancar (Sari dkk., t.t.).

Bagian integral dari proses implementasi adalah pemahaman yang kurang memadai tentang mekanisme pembelajaran jarak jauh di tengah masyarakat sebagai langkah implementasi untuk meningkatkan tingkat pendidikan. Hal ini perlu disadari dalam pemahaman dan pemahaman yang matang. Kebutuhan untuk menerapkan teknologi pendidikan menunjukkan bahwa semua pelaksana siap untuk memahami secara mendasar proses pelaksanaan suatu kegiatan dalam hal aturan dan mekanisme yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut. Bagi tenaga terlatih perlu secara khusus mengembangkan keterampilan tertentu yang mendukung proses pengembangan sesuai dengan kebutuhan aplikasi teknis yang akan dilakukan, sesuai dengan kebutuhan aplikasi di bidang pengembangan. Kebutuhan tenaga terampil menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terukur sudah siap dengan baik untuk dilaksanakan dengan cara memantau elemen yang memiliki bakat dan kesiapan sumber daya manusianya yang matang (Taufik, 2019).

Setiap perguruan tinggi melaksanakan proses penyelenggaraan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai daerah yang berbeda-beda. Mengingat kesiapan dan penyiapan tenaga pendidik yang menjadi pengyokong perkembangan proses pendidikan jarak jauh, dan mengingat tiang pendidikan yang terkonsentrasi masih terstruktur dan belum memiliki model pengembangan. Maka diperlukan mekanisme yang perlu diterapkan yang dapat memenuhi kriteria kompetensi pelaksanaan mengingat masih terstrukturnya pola pendidikan sentralisasi dan kurangnya pengembangan pola penerapan teknologi yang dinilai dapat mempercepat proses penyelenggaraan pendidikan. Adapun mekanisme pendidikan yang tidak baku dapat mengakibatkan persiapan penyelenggaraan pendidikan yang kurang memadai, dan kegiatan pendidikan jarak jauh memerlukan pendidikan khusus untuk dilaksanakan secara komprehensif, cermat dan terencana (Taufik, 2019).

Tanggung jawab pendidik dalam melaksanakan Pembelajaran Jarak jauh lebih ringan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional (Semradova & Hubackova, 2016). Namun hal ini tidak sesuai dengan realitas di lapangan karena sistem pendidikan saat ini menghadapi banyak masalah. Di masa pandemi COVID-19, pembelajaran di Indonesia telah beralih ke pembelajaran jarak jauh, tetapi peralatan, personel, sumber daya yang terbatas, teknologi pendidikan yang terbatas, serta keterampilan dan kualitas guru yang tidak memadai dalam menggunakan teknologi (Dursun et al., 2013) (Jaya, 2017). Ada beberapa hambatan yang cukup besar untuk menggunakan media online, dengan kesalahan teknis seperti konektivitas jaringan dan downtime server, kesalahan, dan hal lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran pembelajaran online (Nurmukhametov et al., 2015).

Penggunaan teknologi tidak memiliki nilai plus jika hanya digunakan untuk menggantikan kertas tulisan tangan untuk pekerjaan rumah peserta didik (Yengin et al., 2011). Selama pandemi ini, faktanya banyak orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembelajaran daring tersebut, salah satunya adalah dihacknya akun yang digunakan dalam proses pembelajaran dan merugikan banyak pihak sehingga proses pembelajaran kurang lancar. Meskipun seperti itu, penggunaan aplikasi android dan website sebagai media pembelajaran diharapkan dapat menumbuhkan minat, motivasi, dan kemandirian belajar serta perkembangan yang pesat dengan tetap memaksimalkan penggunaannya (Tahar, n.d.).

Namun pada kenyataannya sulit untuk mengontrol perkembangan pembelajaran jarak jauh. Meskipun pendidikan yang disertai permainan dapat menumbuhkan minat belajar, peningkatan keberhasilan belajar tidak berjalan dengan efektif (Education et al., 2012). Kreativitas guru dalam memberikan materi melalui media juga sangat diperlukan sebagai faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa pada pembelajaran jarak jauh ini (Simbolon, 2014). Masalah dalam menerima materi akan sulit dalam pembelajaran jarak jauh tanpa tatap muka meskipun pendidik dapat memanfaatkan media dalam proses pembelajaran (Abdi et al., 2018). Melihat kondisi tersebut perlu adanya pelatihan bagi pendidik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang bisa membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh memberikan pengalaman yang sangat berharga, dimana proses pendidikan yang biasa dipusatkan di sebuah gedung bernama sekolah, kampus, beralih ke dunia maya. Dengan adanya social distancing ini, proses belajar peserta didik setidaknya akan didampingi penuh oleh orang tua yang sebagian besar kemungkinan juga bekerja dari rumah. Di sini muncul sebuah momentum, karena orang tua akan kembali memenuhi kewajiban dasarnya sebagai pendidik utama sekaligus penanggung jawab proses

pendidikan bagi anak-anaknya. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat langka sebelum adanya wabah Covid-19 yang merebak di seluruh dunia (Masrul, dkk, 2020).

Sebelumnya, bagi sebagian ayah dan ibu yang disibukkan dengan berbagai topik pekerjaan, banyak yang memberikan kewenangan penuh kepada kampus sebagai landasan metode pendidikan bagi anak-anaknya. Keadaan karena Covid-19 menjadi peluang bagi ibu dan bapak untuk memikirkan teknik dan langsung terlibat dalam pembelajaran anak. Pandemi Covid-19 ini secara substansial telah berdampak pada semua sektor di Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, dan lainnya. Secara sosial dapat dilihat dari penerapan social distancing yang menyebabkan manusia harus berjaga jarak dan dihimbau agar tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang penting. Beberapa pola hidup juga berubah sebagai cara untuk bertahan di tengah Wabah Covid-19 seperti Pola Hidup Sehat. Paskah Merebaknya Covid-19 telah banyak memperkenalkan berbagai hal dari pemerintah atau lembaga masyarakat selain lembaga swadaya masyarakat untuk memberlakukan pola hidup sehat yang terdiri dari menggunakan masker saat meninggalkan tempat tinggal, sering mencuci tangan dan minum lebih banyak vitamin air putih. Kemudian adalah sampel dari sekolah jarak jauh karena adanya himbuan dari Kemendikbud kepada universitas untuk mengatur belajar di dalam negeri selama 2 minggu, banyak perguruan tinggi dan fakultas yang tidak siap untuk menerapkan social distancing. Untuk beberapa universitas sudah memiliki e-gaining knowledge website sehingga tidak lagi terlalu terkesima dengan menggunakan instruksi home learning atau konsep pendidikan jarak jauh yang menggunakan program media dan berbagai aplikasi gratis (Faizin, 2020).

Semua kebijakan tersebut selalu dikait-kaitkan dengan publik. Kebijakan publik adalah pilihan yang mengikat banyak manusia pada tingkat strategis atau garis besar yang dibuat melalui otoritas publik. Kinerja adalah suatu kepentingan yang telah diraih dengan menggunakan tenaga kerja dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pencapaian kontrol tingkat pertama di kampus yang lebih baik dapat diukur dengan tingkat kesenangan klien. Pelatihan yang lebih baik dapat dikatakan mencapai keberhasilan jika dapat menawarkan penawaran sesuai dengan harapan "klien instruksional" dan menghasilkan produk yang berkualitas, khusus untuk masyarakat umum yang menggunakan penawaran akademik (Winarsih, 2017)

SIMPULAN

Pada beberapa proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, seringkali terdapat batasan atau kendala yang dihadapi seperti perbedaan dengan proses pembelajaran yang seharusnya, banyak yang memikirkan kewajiban pendidik dalam menerapkan pembelajaran online ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran jarak jauh memiliki batasan ukuran yang baik, koneksi komunitas dan kesalahan teknis bersama dengan serverdown dan kesalahan lain yang menghambat keberhasilan memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, pihak pemerintah berharap kreativitas guru dalam membekali pembelajaran agar dapat menghimbau kegemaran mahasiswa sehingga berpengaruh terhadap prestasi akademik. Selain itu bantuan sangat diperlukan dari pemerintah untuk menawarkan fasilitas yang menyokong pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Dengan begitu, pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdi, M., Bachtiar, G., & Daryati, D. (2018). Penggunaan Multimedia Interaktif Berbasis Computer Assisted Instruction (CAI) pada Topik Pembahasan Baja Sebagai Bahan Bangunan. *Jurnal PenSil*, 6(2), 9. <https://doi.org/10.21009/jpensil.v6i2.7243>
- Abidin, S. Z. (2006). *Kebijakan publik*. Jakarta; Suara Bebas.
- Arwildayanto, dkk. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung : CV Cendekia Press.
- Bakry, A. (2010). *Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Volume, 14.
- Dursun, T., Oskaybaş, K., & Gökmen, C. (2013). The Quality Of Service Of The Distance Education. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 103, 1133–1151. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.441>
- Education, P., Untuk, G., Hasil, M., Ipa, B., Konsep, B., & Makhluk, K. (2012). Penggunaan Education Game Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Biologi Konsep Klasifikasi Makhluk Hidup. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 1(1), 75–81.

- Faizin, A. & Efendi, D. (2020). *Membaca Korona: Esai-esai Tentang Manusia, Wabah, dan Dunia*. Gresik: Caremedia Communication, h. 50-52.
- Idrus, L. (2019). Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 920–35 .
- Jaya, H. N. (2017). Keterampilan Dasar Guru untuk Menciptakan Suasana Belajar yang Menyenangkan. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 17(1), 23–35. journal.um-surabaya.ac.id/index.php/.../article/.../1275%0A%0A
- Jeffrey, H. dkk, (2020). *Pembelajaran Sains Di Era Akselerasi Digital*. Magetan Jawa Timur : CV AE Media Grafika, h. 1-2.
- Masrul, dkk. (2020). *Pandemik Covid-19: Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia*. Surabaya: Yayasan Kita Menulis, h. 56.
- Muhardi. (2005). Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia, 20(4), 478–92. <<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/153/pdf>>.
- Munir. (2009). *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta CV, h. 8.
- Ni'mah, F. I. (2016). Manajemen Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) Pada Homeschooling “Sekolah Dolan”. *Manajemen Pendidikan*, 25(1), 112–19
- Nurmukhametov, N., Temirova, A., & Bekzhanova, T. (2015). The Problems of Development of Distance Education in Kazakhstan. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 182, 15–19. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.729>
- Public Disclosure Authorized. (2014). *Pendidikan Tinggi di Indonesia: Arah Kebijakan*.
- Sari, W., Rifki, A. M., & Karmila, M. (t.t.). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid. 19(13).
- Semradova, I., & Hubackova, S. (2016). E-Learning prospects and teacher’s skills. 7.
- Simbolon, N. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar peserta didik. *Elementary School Journal Pgsd Fip Unimed*, 1(2), 14–19. <https://doi.org/10.24114/ESJPGSD.V1I2.1323>
- Tahar, I. (n.d.). Hubungan Kemandirian Belajar Dan Hasil Belajar Pada Pendidikan Jarak Jauh.
- Taufik,A. (2019). Perspektif Tentang Perkembangan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan&Konseptual*, 3(2), 88–98
- Tilaar, H.A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Magelang: Indonesia Tera.
- Tilaar, H.A.R. (2005). *Manifesto Pendidikan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tilaar, H.A.R dan Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarsih, S. (2017). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Cendekia: Journal of Education and Society*, 15(2), 51. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v15i2.1005>
- Yengin, I., Karahoca, A., Karahoca, D., & Uzunboylu, H. (2011). Deciding which technology is the best for distance education: Issues in media/technology comparisons studies. *Procedia Computer Science*, 3, 1388–1395. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2011.01.020>
- Yuliawati, S. (2012). Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Sebagai Fenomena Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Pendidikan*, 28-33.